



PENGARUH EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PAD DENGAN JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH KOTA PROVINSI JAWA TENGAH

Sang Ayu Kompiang Puspita Wulandari, Abdul Rohman¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6283114178540

ABSTRACT

The component of increasing Regional Original Revenue (PAD), namely local taxes and retribution, is very important in the sustainability of regional development and progress to harmonize decentralization. The focus of this study is to obtain empirical evidence on the influence of Local Taxes Efficiency and Local Retribution, Local Taxes Effectiveness and Local Retribution on the increase of city government PAD in Central Java Province. Based on the limitations of previous research, this study added the population as a moderation variable to test the relationship between independent and dependent variables.

This research used secondary data obtained from the financial statements of city governments in Central Java for the 2018-2023 period so that 36 research samples can be obtained. The analysis methods used were quantitative descriptive methods and multiple linear regression analysis with special analysis of the influence of population as a moderation variable.

The results of the research show that the efficiency of local taxes has a positive and significant effect on increasing PAD. Meanwhile, the efficiency of local retribution revenue and the effectiveness of tax revenue and local retribution do not have a significant influence on the increase in PAD. On the other hand, population size has not been proven to moderate this influence, where cities with large tax and local retribution bases do not automatically increase PAD as a result of the population in each of these cities..

Keywords: Efficiency, Effectiveness, Local Taxes, Local Retribution.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional, sehingga pelaksanaannya sudah pasti membutuhkan pembiayaan yang memadai. Upaya untuk mencapai kemandirian daerah mencakup kemampuan dalam menyelenggarakan pembangunan serta mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan secara otonom, pemerintah daerah diberi peluang agar mengeksplorasi dan memaksimalkan berbagai potensi sumber keuangan yang tersedia di wilayahnya yang dinamakan otonomi daerah (desentralisasi). Implikasinya adalah daerah diharapkan mempunyai kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayai kebutuhan seluruh kebutuhannya pemerintahannya secara mandiri, yang salah satu sumbernya adalah dari pendapatan asli daerah

Menurut Wahyudi (2010), dorongan untuk meningkatkan PAD semakin menguat sejalan dengan bertambahnya kewenangan yang dialihkan kepada pemerintah daerah, yang turut disertai dengan pemindahan sumber daya manusia, pendanaan, perlengkapan, serta dokumen dalam jumlah besar. Ketergantungan fiskal dari PEMDA pada pemerintah pusat apabila tidak segera ditangani, berpotensi menimbulkan peningkatan beban fiskal bagi pemerintah pusat. Dalam upaya peningkatan PAD, retribusi dan pajak daerah menjadi

¹ Corresponding author



komponen utama yang berperan strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di tingkat daerah. Di sejumlah kota di Jawa Tengah, pajak daerah sudah memberi kontribusi yang substansial terhadap pendanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah, mencakup layanan kesehatan, sektor pendidikan, serta pembangunan infrastruktur.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fondasi krusial untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, terutama di era kebijakan sistem pembayaran yang mudah. Pada tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah dalam hal kontribusi retribusi dan pajak daerah atas PAD telah mencapai rata-rata 68,4% berdasarkan data Biro Pusat Statistik Jateng (2023), namun terjadinya disparitas capaian antarkota/kabupaten sebesar 21,8% mengindikasikan adanya temuan masalah terkait efektivitas dan efisiensi retribusi daerah dan pemungutan pajak. Beberapa penelitian terdahulu hanya menggunakan komponen pajak daerah atau retribusi saja, tidak secara komprehensif menggabungkan keduanya sebagai sumber utama PAD. Hal ini menyebabkan analisis kontribusi terhadap PAD menjadi kurang utuh.

Di sisi lain, tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah tetap ada. Efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi masih menjadi isu yang perlu diperhatikan, mengingat adanya biaya pemungutan yang tinggi dan kesadaran masyarakat yang belum optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, efektivitas penerimaan pajak dan retribusi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, namun juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program perpajakan.

Riset mengenai pengaruh efisiensi dan efektivitas penerimaan retribusi dan pajak daerah terhadap peningkatan PAD, dengan jumlah penduduk menjadi variabel moderasi di pemerintah kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki beberapa celah yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa (2024) terdapat celah yang belum terjawab bahwa kurangnya eksplorasi mengenai faktor-faktor di luar efektivitas dan kontribusi yang dapat memengaruhi PAD. Penelitian ini berfokus pada analisis kuantitatif efektivitas dan kontribusi, namun belum mendalami mengapa, meskipun efektivitas tinggi (khususnya retribusi daerah), kontribusi terhadap PAD tetap rendah. Contoh selanjutnya adalah Nurdian (2024) yang menganalisis pengaruh kontribusi dan efektivitas pajak daerah pada PAD di Jawa Barat yang belum menggunakan variabel moderasi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Pentingnya PAD tidak hanya terletak pada hubungannya terhadap total pendapatan daerah, tetapi juga pada peranannya dalam mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Semakin besar proporsi PAD atas total pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan layanan terhadap masyarakat. Maka, efisiensi dan efektivitas penerimaan PAD menjadi sangatlah krusial untuk pendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Jumlah penduduk sebagai variabel moderasi dipilih karena memiliki potensi untuk memperkuat maupun melemahkan pengaruh efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi serta pajak daerah pada peningkatan PAD. Ngangu *et al.* (2024), jumlah penduduk yang besar dapat memperluas basis pajak sehingga pengaruh pajak daerah pada PAD bisa diperkuat, tapi tidak selalu memberikan dampak yang sama terhadap retribusi daerah, yang pengaruhnya justru menurun seiring bertambahnya jumlah penduduk. Sejalan dengan pendapat Halim (2004), di Provinsi Jawa Tengah, kepadatan penduduk dan dinamika urbanisasi di wilayah perkotaan menambah kompleksitas dalam pengelolaan pajaket dan retribusi daerah. Tingginya mobilitas penduduk di perkotaan dapat mempengaruhi efektivitas pemungutan retribusi pelayanan publik, karena kebutuhan dan pola konsumsi masyarakat kota yang lebih dinamis menuntut pelayanan publik yang lebih adaptif. Kedua komponen PAD yaitu pajak dan retribusi daerah tersebut sangatlah penting untuk

keberlangsungan pembangunan dan kemajuan daerah agar menyelaraskan desentralisasi. Oleh karena itu, analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan retribusi & pajak daerah Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah perlu dilaksanakan untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan pemerintah kedepannya.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Teori Stakeholder

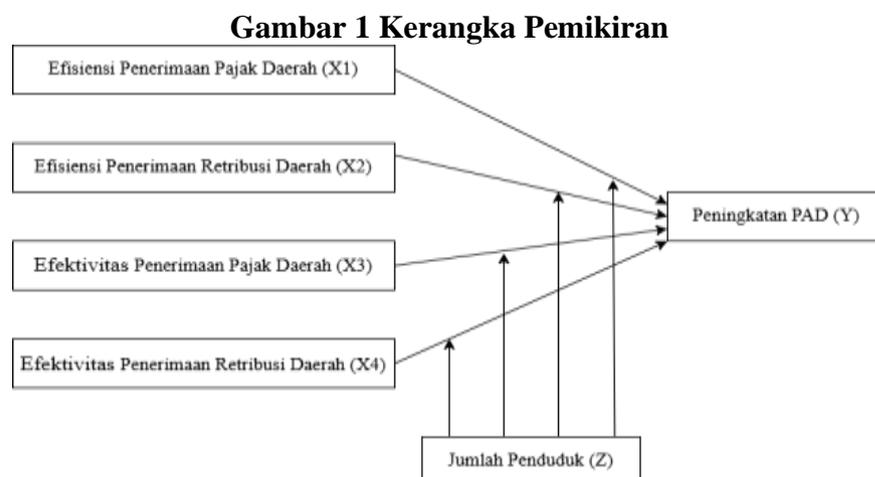
Teori *stakeholder* dikemukakan pertama kali oleh R. Edward Freeman (1984), yang menyatakan organisasi bukan hanya bertanggungjawab pada pemilik saham, namun pada seluruh pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) atas keberlangsungan organisasi tersebut. *Stakeholders* dapat berupa pemerintah, karyawan, pelanggan, komunitas lokal, dan kelompok lain yang terkait dengan aktivitas. Prinsip utama dari teori *stakeholder* ini menurut Durlista *et al.* (2023) adalah organisasi atau pemerintah harus mengedepankan kepentingan seluruh pihak dalam pengambilan kebijakan, tidak hanya kepentingan pemegang saham untuk kepentingan jangka panjang dan menciptakan korelasi positif antara penduduk sekitar.

Teori *stakeholder* dalam konteks pajak dan retribusi daerah yaitu masyarakat atau penduduk merupakan *stakeholder* eksternal yang berperan sebagai wajib pajak dan wajib retribusi sekaligus penerima manfaat dari penggunaan komponen PAD. Sedangkan pemerintah daerah sebagai pengelola harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam mengelola pajak dan retribusi secara efisien dan efektif agar peningkatan PAD dapat tercapai dan digunakan untuk menunjang pelayanan publik dengan optimal.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha juga ditegaskan dalam upaya menciptakan pengembangan ekonomi daerah yang berdaya saing. Pemerintah daerah perlu menjadi penggerak utama dalam mengorkestrasi sinergi seluruh *stakeholder* secara inklusif, sehingga kebijakan fiskal yang diterapkan benar-benar bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Maka, optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah bukan hanya ketergantungan pada kebijakan pemerintah semata, tapi juga pada tingkat partisipasi, jumlah penduduk, dan kolaborasi seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam ekosistem pembangunan daerah.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema.



Perumusan Hipotesis

Efisiensi Pajak Daerah terhadap PAD

Dalam konteks pajak daerah, efisiensi diartikan sebagai kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola biaya pemungutan pajak untuk menghasilkan penerimaan yang optimal. Sejalan dengan itu, Freeman (1984) dalam teori *stakeholder* bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah pusat.

Penelitian oleh Putri (2016) yang menunjukkan bahwa efisiensi dalam pengelolaan pajak berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan daerah. Tingkat efisiensi untuk retribusi daerah dan pajak daerah Kota Surakarta selama 6 tahun masuk pada klasifikasi sangat efisien. Selain itu, efisiensi pajak daerah dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Efisiensi pajak daerah yang tinggi akan memperkuat legitimasi pemerintah daerah di mata stakeholder karena menunjukkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

H1: Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Peningkatan PAD

Efisiensi Retribusi Daerah terhadap PAD

Retribusi daerah mengukur kemampuan PEMDA dalam mengelola biaya pemungutan retribusi agar menghasilkan penerimaan yang optimal. Semakin efisien sistem pemungutan retribusi, semakin besar potensi peningkatan PAD dari sektor retribusi. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa pengelolaan keuangan, termasuk penerimaan dari retribusi daerah, dilakukan secara efisien agar dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh *stakeholder*. Sejalan dengan pendapat Bird (2000), efisiensi dalam sistem pemungutan retribusi daerah berarti pemerintah mampu mengumpulkan penerimaan dengan biaya administrasi yang rendah, mendorong kepatuhan sukarela, serta meminimalkan kebocoran dan penghindaran pembayaran retribusi.

Penelitian oleh Puspitasari (2014) dan Khairunnisa (2024) membuktikan efisiensi penerimaan retribusi daerah memengaruhi secara negatif atas peningkatan PAD. Temuan penelitian tersebut membuktikan semakin efisien proses pemungutan retribusi, semakin besar kontribusinya terhadap PAD, karena biaya pemungutan yang rendah dan kepatuhan masyarakat yang tinggi akan meningkatkan realisasi penerimaan retribusi.

H2: Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh negatif terhadap Peningkatan PAD

Efektivitas Pajak Daerah terhadap PAD

Berdasarkan hasil penelitian Permatasari (2023) tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2016-2019 secara rerata termasuk dalam kriteria sangat efektif (>100%). Oleh karena itu, hipotesis ini dibangun berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang menghasilkan pengaruh signifikan atas efektivitas pajak daerah atas peningkatan PAD.

H3: Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Peningkatan PAD

Efektivitas Retribusi Daerah terhadap PAD

Sujarweni (2015) menegaskan bahwa efektivitas retribusi daerah adalah tolok ukur utama keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor ini. Tingkat efektivitas yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi potensi retribusi yang ada, menetapkan tarif yang sesuai, serta

menerapkan mekanisme pemungutan yang efektif. Konsekuensinya, efektivitas retribusi daerah berkontribusi positif terhadap peningkatan PAD.

Puspitasari (2014) membuktikan efektivitas retribusi daerah Kabupaten Blora selama 5 tahun (2009-2013) menghasilkan rata-rata nilai rasio yang sangatlah efektif. Hasil analisis statistik uji beda *t-test*, ditemukan tidak terdapat perbedaan signifikan antara tingkat efektivitas retribusi dan pajak daerah. Temuan ini sekaligus mengkonfirmasi adanya pengaruh positif yang setara dari efektivitas penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD, sebagaimana yang ditunjukkan oleh efektivitas penerimaan pajak daerah.

H3: Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Peningkatan PAD

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk sebagai faktor eksternal berperan penting dalam memperkuat atau bahkan memperlemah pengaruh efisiensi dan efektivitas pajak daerah terhadap peningkatan PAD. Halim (2004) mengemukakan bahwa jumlah penduduk yang besar akan memperluas basis pajak, sehingga potensi penerimaan PAD juga meningkat. Pendapat ini sejalan dengan temuan Ngangu *et al.* (2020) menyatakan daerah dengan populasi yang lebih banyak berpeluang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan retribusi. Sehingga, pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan fiskal dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat sebagai *stakeholder* utama, sebagaimana ditegaskan oleh Freeman (1984) dalam teori stakeholder. Penyesuaian ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar mampu menjawab tantangan dan memaksimalkan potensi penerimaan daerah sesuai dengan kondisi demografis yang ada terutama kota-kota besar di Provinsi Jawa Tengah.

H5: Jumlah Penduduk memoderasi pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan beserta pengukurannya.

Populasi dan Sampel

Uma Sekaran (2016), populasi tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga meliputi objek dan fenomena lain yang memiliki relevansi dengan penelitian. Oleh karena itu, populasi mencakup seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menganalisis populasi pemerintah provinsi yang ada di Indonesia dengan sampel Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mencakup enam (6) kota dari tahun 2018-2023. Pemilihan sampel Pemkot di Provinsi Jawa Tengah dilakukan untuk mewakili wilayah perkotaan yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan pemerintah kabupaten.

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menerapkan dua variabel yakni variabel dependen berupa Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, variabel independennya yaitu Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah, dan variabel moderasi berupa jumlah penduduk.

Tabel 1
Variabel dan Pengukurannya

No	Variabel	Definisi	Rumus
1.	Peningkatan PAD	Peningkatan PAD yaitu peningkatan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	$\text{Peningkatan PAD} = \frac{\Delta \text{PAD Tahun ini} - \text{PAD Tahun lalu}}{\text{PAD Tahun lalu}} \times 100\%$
2.	Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah	Efisiensi penerimaan pajak daerah merepresentasikan rasio komparatif antara total biaya operasional yang dikeluarkan saat proses perpajakan dengan realisasi pendapatan pajak yang berhasil dicapai.	$\text{Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$
3.	Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah	Efisiensi penerimaan retribusi daerah berhubungan dengan besar kecilnya biaya yang dipakai atas realisasi penerimaan retribusi sendiri.	$\text{Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$
4.	Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah	Efektivitas penerimaan pajak daerah menggambarkan sejauh mana PEMDA mampu meraih target penerimaan pajak yang sudah ditentukan.	$\text{Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$
5.	Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah	Efektivitas penerimaan retribusi daerah dapat diartikan sebagai merepresentasikan rasio komparatif antara capaian aktual penerimaan retribusi terhadap target anggaran yang sudah ditetapkan.	$\text{Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$
6.	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk merupakan agregasi individu yang mendiami suatu wilayah geografis tertentu dalam kurun waktu tertentu.	Berdasarkan data jumlah penduduk masing-masing kota setiap tahun.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi hasil analisis yang meliputi analisis statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, dan hasil uji hipotesis.

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Maxi	Mean	Std. Deviation
Peningkatan PAD	36	-0,14	0,28	0,0583	0,09826
Efisiensi Pen. Pajak Daerah	36	0,01	0,05	0,0306	0,01013
Efisiensi Pen. Retribusi Daerah	36	0,01	0,05	0,0300	0,01219
Efektivitas Pen. Pajak Daerah	36	0,71	1,25	1,0592	0,11031
Efektivitas Pen. Retribusi Daerah	36	0,59	1,43	0,9578	0,21992
Jumlah Penduduk	36	121526	1814110	521049,97	554731,145
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data Sekunder Diolah. (2025)

Berdasarkan tabel 2 di atas, data penelitian ini terdiri dari 36 sampel data yang diolah. Pengujian analisis deskriptif tersebut memperlihatkan jumlah data keseluruhan, nilai standar deviasi, maksimal, *mean*, dan minimal tiap variabel yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peningkatan PAD (Y) sebagai variabel dependen memiliki *mean* sebesar 0,0583 di mana nilainya lebih kecil daripada nilai standar deviasinya yakni sebesar 0,0982 sehingga datanya terdistribusi normal. Hal tersebut menandakan bahwa variabel Peningkatan PAD bersifat tidak homogen dengan nilai minimum sebesar -0,14 dan

nilai maksimumnya adalah 0,28. Adanya nilai minus pada variabel Peningkatan PAD karena adanya penurunan PAD dalam beberapa tahun dan kota dalam rentang waktu tersebut.

- b. Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah (X1) memiliki *mean* sebesar 0,0306 di mana nilainya lebih besar daripada nilai standar deviasinya yakni sebesar 0,0101 sehingga datanya terdistribusi normal. Hal tersebut menandakan bahwa variabel efisiensi penerimaan pajak daerah bersifat homogen dengan nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimumnya adalah 0,05. Mean mewakili gambaran umum tentang nilai-nilai dalam data penelitian.
- c. Variabel Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah (X2) memiliki *mean* sebesar 0,0300 di mana nilai tersebut lebih besar daripada nilai standar deviasinya yakni sebesar 0,0121 sehingga datanya terdistribusi normal karena semakin besar standar deviasinya maka semakin besar pula variasi data tersebut. Variabel efisiensi penerimaan retribusi daerah bersifat homogen dengan nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimumnya adalah 0,05.
- d. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah (X3) memiliki *mean* sebesar 1,0592 di mana nilai tersebut lebih besar daripada nilai standar deviasinya yakni sebesar 0,11031 sehingga datanya terdistribusi normal karena semakin besar standar deviasinya maka semakin besar pula variasi data tersebut. Variabel efektivitas penerimaan pajak daerah bersifat homogen dengan nilai minimum sebesar 0,71 dan nilai maksimumnya 1,25.
- e. Variabel Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah (X4) memiliki *mean* sebesar 0,9578 di mana nilainya lebih besar daripada nilai standar deviasinya yaitu sebesar 0,21992 sehingga datanya terdistribusi normal karena semakin besar standar deviasinya. Oleh karena itu, variabel efektivitas penerimaan retribusi daerah bersifat homogen dengan nilai minimum sebesar 1,43 dan nilai maksimumnya adalah 0,95.
- f. Variabel Jumlah Penduduk (Z) memiliki *mean* sebesar 521049,97 dimana nilai tersebut lebih kecil dibanding nilai standar deviasinya yaitu sebesar 554731,14 sehingga datanya terdistribusi normal. Oleh karena itu, variabel efektivitas penerimaan retribusi daerah bersifat tidak homogen dan terindikasi memiliki persebaran yang tidak merata dengan nilai minimum sebesar 121526 dan nilai maksimumnya adalah 1814110.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3
Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas		
Kolmogorov-Smirnov		0,200
b. Uji Multikolinieritas		
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Efisiensi Pen. Pajak Daerah	0,511	1,958
Efisiensi Pen. Retribusi Daerah	0,480	2,082
Efektivitas Pen. Pajak Daerah	0,631	1,585
Efektivitas Pen. Retribusi Daerah	0,629	1,589
Jumlah Penduduk	0,794	1,259

c. Uji Heterokedastisitas		
	T	Sig.
Efisiensi Pen. Pajak Daerah	-0,860	0,396
Efisiensi Pen. Retribusi Daerah	-0,082	0,935
Efektivitas Pen. Pajak Daerah	0,205	0,839
Efektivitas Pen. Retribusi Daerah	0,732	0,470
Jumlah Penduduk	-1,007	0,322
d. Uji Autokorelasi		
<i>Run-Test</i>		0,612

Ket : Uji Heterokedastisitas diuji terhadap ABRESID
 Sumber : Data Sekunder Diolah. (2025)

Tabel 3 diatas menampilkan hasil uji asumsi klasik, dimana pada bagian a berisi hasil uji normalitas dengan nilai signifikansi telah melebihi dari 0,05 yakni sebesar 0,200 yang berarti data yang dianalisis terdistribusi normal sehingga dapat melanjutkan pengujian ke tahap berikutnya. Selanjutnya pada bagian b menampilkan hasil uji multikolinieritas yang tidak terdapat masalah atau gejala multikolinieritas pada seluruh variabel dikarenakan nilai *tolerance* sudah $\geq 0,10$ dan nilai VIFnya ≤ 10 . Pada bagian c adalah pengujian heterokedastisitas yang juga tidak terjadi tanda- tanda masalah pada heterokedastisitas dikarenakan nilai signifikansi seluruh variabel adalah $> 0,05$ setelah dilakukan uji glejser terhadap variabel dependen ABRESID. Selanjutnya pengujian asumsi klasik yang terakhir yaitu uji autokorelasi pada bagian d menerapkan uji *run-test*. Hasil dari *run-test* tersebut telah melebihi 0,05 yaitu sebesar 0,612 yang menandakan tidak terjadi autokorelasi.

Multiple Regression Analysis

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Stand. Coeff.	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,278	0,140		1,987	0,056
	Efisiensi Pen. Pajak Daerah	5,990	1,802	0,617	3,325	0,002
	Efisiensi Pen. Retribusi Daerah	2,234	1,543	0,277	1,447	0,158
	Efektivitas Pen. Pajak Daerah	-0,510	0,149	-0,572	-3,424	0,002
	Efektivitas Pen. Retribusi Daerah	0,043	0,075	0,096	0,576	0,569
	Jumlah Penduduk	5,5606	0,000	0,314	2,109	0,043

Merujuk hasil uji regresi linier berganda pada tabel 4, persamaan regresi dapat dirumuskan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Z + e$$

$$Y = 0,278 + 5,990X_1 + 2,234X_2 + -0,510X_3 + 0,043X_4 + 5,5606Z + e$$

Nilai dari konstanta 0,278 menunjukkan bahwa variabel independen dan moderasi nilainya adalah 0 dengan peningkatan PAD sebesar 0,278. Nilai koefisien regresi 5,990 membuktikan bahwa variabel efisiensi penerimaan pajak daerah naik sebesar 4% yang artinya peningkatan PAD meningkat 5,990. Selanjutnya nilai koefisien regresi 2,234 membuktikan bahwa variabel efisiensi penerimaan retribusi daerah turun sebesar 3% yang artinya peningkatan PAD menurun 2,234. Lalu untuk nilai koefisien regresi 0,510 membuktikan bahwa variabel efektivitas penerimaan pajak daerah naik sebesar 3% yang artinya peningkatan PAD meningkat 0,510. Selanjutnya nilai koefisien regresi 0,043 membuktikan bahwa variabel efektivitas penerimaan retribusi daerah turun sebesar 1% yang artinya peningkatan PAD menurun 0,043. Lalu untuk variabel moderasinya, nilai nya naik sebanyak 5% menjadi 5,5606 sehingga peningkatan PAD meningkat.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)		
		0,472
a. Uji Statistik F		
F		5,359
Sig.		0,001
b. Uji Statistik T		
	t	Sig.
Efisiensi Pen. Pajak Daerah	3,325	0,002
Efisiensi Pen. Retribusi Daerah	1,447	0,158
Efektivitas Pen. Pajak Daerah	-3,424	0,002
Efektivitas Pen. Retribusi Daerah	0,576	0,569
Jumlah Penduduk	2,109	0,043

Tabel 5 diatas menunjukkan hasil pengujian hipotesis, pada bagian a menampilkan perolehan koefisien determinasi. Dapat diketahui bahwa variabel independent dan moderasi penelitian ini berpengaruh sebesar 0,472 atau 47,2% sementara sisanya sebanyak 52,8% terpengaruhi oleh variabel selain dari variabel independent dan moderasi yang digunakan penelitian ini. Pada bagian b, menampilkan hasil uji statistik F yang nilai signifikansinya 0,001 dan dibawah 0,05 dimana hal tersebut menandakan seluruh variabel secara simultan mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya pada bagian c yaitu hasil

pengujian statistik T, variabel efisiensi penerimaan pajak daerah nilai signifikansi nya sebesar 0,002 yang sudah di bawah 0,05 sehingga H1 diterima. Selanjutnya pada variabel efisiensi penerimaan retribusi daerah sebesar 0,158 yang berarti nilai signifikansinya di atas 0,05 sehingga H2 diteima. Pada variabel efektivitas penerimaan pajak daerah sebesar 0,002 namun uji t nya -3,424 sehingga H3 ditolak. Pada variabel efektivitas penerimaan retribusi daerah sebesar 0,569 artinya secara parsial variabel ini tidak mempengaruhi secara signifikan pada peningkatan PAD sehingga H4 ditolak. Pada bagian variabel moderasi yaitu jumlah penduduk, hasilnya sebesar 0,043 yang nilainya di bawah 0,05 sehingga kemungkinan besar jumlah penduduk mempengaruhi secara signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil Uji MRA

Tabel 6
Hasil Uji MRA

Model	Unstandardized Coefficients		Stand. Coef.	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,293	0,275		1,064	0,297
Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah	9,363	3,580	0,965	2,615	0,015
Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah	0,904	2,602	0,112	0,347	0,731
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah	-0,624	0,342	-0,701	-1,826	0,079
Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah	0,097	0,122	0,218	0,800	0,431
Z_Jumlah Penduduk	2,001	0,000	1,130	0,533	0,598
X1Z	-5,089	0,000	-0,699	-1,145	0,263
X2Z	-1,985	0,000	-0,027	-0,035	0,972
X3Z	9,767	0,000	0,557	0,233	0,817
X4Z	-1,378	0,000	-0,689	-0,819	0,420

Sesuai dengan hasil uji regresi linier berganda pada tabel 6 diatas, pada bagian ini penulis menambahkan *moderating effect* sehingga persamaan regresi moderasi dapat dirumuskan sebagai :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_1Z + \beta_6X_2Z + \beta_7X_3Z + \beta_8X_4Z + e$$

$$Y = 0,293 + 9,363X_1 + 0,904X_2 - 0,624X_3 + 0,097X_4 + 2,001Z - 5,089X_1Z - 1,985X_2Z + 9,767X_3Z - 1,378X_4Z + e$$

Berdasarkan tabel 6 diatas, jika nilai konstanta 0,293, peningkatan PAD bernilai 0,293 jika variabel independen dan moderasi sama dengan nol. Pada koefisien variabel efisiensi penerimaan pajak daerah (X1) mempengaruhi peningkatan PAD sebesar 9,363, sedangkan jika jumlah penduduk ditambahkan sebagai variabel moderasi (Z), maka akan menghasilkan nilai -5,089. Selanjutnya, pada koefisien variabel efisiensi penerimaan retribusi daerah (X2) mempengaruhi peningkatan PAD sebesar 0,904, sedangkan jika

jumlah penduduk ditambahkan sebagai variabel moderasi (Z), maka akan menghasilkan nilai 0,972. Selanjutnya, pada koefisien variabel efektivitas penerimaan pajak daerah (X3) mempengaruhi peningkatan PAD sebesar -0,624, sedangkan jika jumlah penduduk ditambahkan sebagai variabel moderasi (Z), maka akan menghasilkan nilai 0,817. Karena koefisiennya bernilai negatif, apabila efektivitas penerimaan pajak daerah naik sebesar satu satuan, maka peningkatan PAD akan terjadi penurunan sebanyak nilai tersebut. Terakhir, pada koefisien variabel efektivitas penerimaan retribusi daerah (X4) mempengaruhi peningkatan PAD sebesar 0,097, sedangkan jika jumlah penduduk ditambahkan sebagai variabel moderasi (Z), maka akan menghasilkan nilai 0,420 untuk peningkatan PADnya.

KESIMPULAN

Simpulan

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah sebagai strategi utama dalam optimalisasi PAD, sementara faktor jumlah penduduk belum dapat dijadikan penentu utama dalam peningkatan PAD di pemerintah kota Provinsi Jawa Tengah.

Keterbatasan

Penelitian ini tidak melakukan analisis empiris perbandingan langsung antara kebijakan pajak daerah di Indonesia dengan negara lain seperti Inggris, Australia, ataupun negara lainnya sehingga pembelajaran dari praktik internasional hanya bersifat konseptual.

Saran

Penelitian selanjutnya dapat membandingkan kebijakan mengenai *local tax*, diperlukanlah perbandingan dengan kebijakan pajak negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia sehingga hasil yang didapatkan akan mencapai akuntabilitas dan lebih kompleks.

Terkait implikasi kebijakan untuk pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah, maka PEMDA diharapkan untuk meningkatkan potensi dan pengeleloaannya lebih baik sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan PAD dan masyarakat yang menjadi wajib retribusi dapat merasakan secara langsung hasil pengelolaan retribusi yang telah mereka bayarkan.

REFERENSI

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bird, Richard M. dan Francois Vaillancourt,. Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang: Tinjauan Umum, dalam Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt (Penyunting), *Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang* (Terjemahan), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Biro Pusat Statistik Jawa Tengah. (2023). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2023*. Jawa Tengah: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Durlista, M. A., & Wahyudi, I. (2023). Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social dan Governance (ESG) terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Periode 2017-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 210–232. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3327>
- Freeman, R.E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman, Boston.



- Khairunnisa. (2024). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Akuntansi*.
- Maria, Ngangu *et al.* 2024. Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Variabel Moderasi Jumlah Penduduk pada Kabupaten Manggarai. *Journal of Business Finance and Economic* Volume 5, Nomor 2.
- Nurdian, T. (2024). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023). *Jurnal Akuntansi*.
- Permatasari, M. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah ((Studi kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*.
- Putri, I. M. (2016). Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Asli Daerah di Kota Surakarta Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*.
- Rizky Ayu Puspitasari, E. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Jurnal Akuntansi*.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2016. *Research Methods For Business: A Skill Building Approach, 7th Edition*. New Jersey: Wiley
- V. Wiratna Sujarweni (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Penerbit: Pustaka Baru Yogyakarta.